

Judul : Baru sekedar mainan digital
Tanggal : Minggu, 30 Juni 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

ETALASE

Baru Sekedar Mainan Digital

Pertengahan 1990-an, saat internet mulai menyebar di Amerika Serikat, film *The Net* keluar. Dibintangi Sandra Bullock, *The Net* menceritakan seorang program komputer hidup menyendiri mengandalkan teknologi. Bekerja dari rumah, memesan dan membayar barang secara daring, hanya membuka pintu setelah kurir pergi, dan nyaris tak bertangga. Saat secara digital identitasnya dicuri, ia tak bisa membuktikan identitasnya sendiri.

Pelajaran moral yang ditarik banyak penonton saat itu adalah selain mempertahankan interaksi dengan manusia lain, sebaiknya tak semua hal dipindahkan ke dunia maya demi menghindari kejahatan.

Ironis karena digitalisasi diharapkan mengamankan dan melestarikan dokumen penting. Kita semua tahu kasus pemalsuan KTP, ijazah, dan berbagai dokumen lain karena kertas cetakan bisa dipalsukan. Ketergantungan pada dokumen fisik juga bisa membocorkan identitas—terjadi Desember 2021, surat keterangan kependudukan mantan Menteri Susi Pudjiastuti dijadikan bungkus bakwan.

Saya termasuk menikmati digitalisasi data di sektor privat—rumah sakit, perbankan, dan transportasi—memudahkan pencarian riwayat kesehatan, portofolio keuangan, dan detail perjalanan. Namun, di saat yang sama, saya masih melindungi privasi sejauh mungkin.

Saya masih berimbang memakai tunai dan nontunai karena sebagai mantan manajer kartu kredit yang bertugas membentuk profil pemegang kartu dari transaksi, saya paham makin banyak data transaksi makin mudah membentuk profil untuk ditarget program. Setiap melihat orang ringan memakai QRIS untuk transaksi kecil rutin sehari-hari, seperti beli kopi, saya tersenyum membayangkan betapa leluasanya *data mining* yang sekarang bisa dilakukan dari transaksi seseorang.

Saya juga menolak pemakaian *face recognition* yang sempat digalakkan di stasiun kereta api. Toh, pembelian tiket kereta sudah dengan KTP yang akan diperiksa di pintu masuk. Saya tak melihat perlunya memasukkan wajah saya ke sistem. Termasuk tahun lalu di Bandara Narita, saya memilih menolak *check in* dengan rekam wajah.

Penolakan saya pada *face recognition* KAI juga diimbangi ketidakpercayaan bahwa data akan aman. Organisasi swasta dan Pemerintah Indonesia jadi sasaran pembobolan data sekian tahun ini. Berita terbesar di Indonesia pada Maret 2020 bukan cuma kasus Covid-19 pertama, tapi juga dibobolnya data pasar digital Tokopedia. Sekitar 15 juta data pribadi dan transaksi pengguna dilempar ke publik. Tak lama berselang, peretasan Peduli Lindungi yang memuat data vaksinasi Covid-19.

Dua tahun kemudian, peretas dengan nama samaran Bjorka menyentak Indonesia karena membobol data KPU dan pemegang kartu SIM. Lalu, beberapa hari ini, beruntun diretasnya data intelijen, sidik jari (Inafis), Ditjen Perhubungan Udara, PT KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Perekonomian, serta BPJS Ketenagakerjaan. Penelusuran singkat di akun X (Twitter) FalconFeedio menunjukkan juga diretasnya BUMN, seperti PT Pupuk Iskandar Muda, dan perusahaan swasta seperti PT Samuel Sekuritas Indonesia.



Yang paling gila tentunya adalah serangan *ransomware* atas Pusat Data Nasional. Datanya disandera dan peretasnya minta dibayar 8 juta dollar Amerika Serikat. Apabila dibayar belum tentu data dilepaskan, tidak dibayar data 200-an instansi bisa dijual.

Sesaat saya teringat konsep *fire sale* di *Live Free or Die Hard*, film Bruce Willis tahun 2007 yang mengisahkan peretas me-

nyasar infrastruktur sebuah negara, mulai dari listrik sampai pasar modal, demi melumpuhkannya. Bukannya listrik Sumatera habis padam dua hari tanpa sebab, ya?

Se-Indonesia gempar. Menkominfo dan Kepala BSSN disidang DPR, pemerintah didampar rakyat di media sosial, terutama yang terdampak langsung di bandara saat data imigrasi lumpuh. Dan, di sini lebih gilanya—rapat DPR menguak bahwa hanya 2 persen dari data PDN yang punya cadangan (*back up*), dan data yang sudah tersandera terkategori hilang. Instansi seperti Imigrasi yang patuh menyerahkan datanya untuk disimpan PDN jadi korban. Betul kata wakil rakyat Meutya Hafid, ini bukan masalah tata kelola, melainkan kebobrohan.

Saat jajaran IT pemerintah gagal melindungi data kita dari *telemarketer* dan pinjaman *online*, membiarkan judi *online* merajalela, dan sekarang dari peretas kelas dunia, tiada jalan lain bagi rakyat kecuali melindungi diri sendiri. Ironis karena kita bernegara dan bayar pajak untuk pengelolaan profesional, tapi kenyataannya lagi-lagi kita tak dilindungi.

Jadi, mari lindungi diri sendiri. Luangkan waktu, cuti kerja kalau perlu, kita kumpulkan, rapikan, dan arsipkan data pribadi. Akta kelahiran, KTP, SIM, paspor, kartu keluarga, buku nikah, ijazah sekolah, akad kredit, sertifikat properti, tanda kepemilikan kendaraan, slip gaji, laporan pajak, bilyet deposito, tanda bukti pembelian produk pasar modal, bukti bayar BPJS, bukti bayar PBB, bukti bayar asuransi apa pun, bahkan bukti bayar sekolah anak. Beberapa dokumen, seperti kartu keluarga dan akta kematian yang sudah dalam bentuk digital, tetap dicetak dalam kertas untuk diarsipkan secara fisik.

Bagaimana mengarsipkan secara fisik? Bentuk *master file* berisi semua dokumen penting asli dan simpan di brankas, baik di rumah maupun *safe deposit* yang bisa disewa di bank. Fotokopi dari semua dokumen di *master file* disimpan aman, tetapi mudah dijagkau di rumah. Khusus KTP, SIM, atau mungkin paspor bajaj yang acap bepergian, aslinya bisa ditinggal di rumah, fotokopinya yang masuk ke *master file*. Rajin cetak buku bank, jangan cuma minta mutasi bank saat perlu atau menunggu *bank statement* bulanan. Mau mengarsipkan secara di-

gital? Silakan, tapi pastikan perangkat teknologi Anda bebas virus, rajin menyimpan *back up*, dan taat membayar sewa Cloud. Saya kenal seorang kawan yang bukan saja melakukan ini semua. Ia juga menyimpan dua *back up* dalam *hard disk*—satu disimpan di rumah, satunya di simpan di brankas yang hanya ia dan pasangannya yang tahu lokasinya.

Apabila memiliki visa elektronik dari negara asing, *print* dan simpan bersama paspor. Dan, selama data Indonesia masih jadi sasaran serang, setiap bepergian *print* saja dulu berkas-berkas perjalanan.

Ribet? Ini realitas negara yang belum jadi pemain digital, baru sekedar mainan digital. Di sinir yang viral minggu ini, seorang peretas Indonesia terkekeh-kekeh bercerita bahwa instansi pemerintah adalah sasaran "latihan", saking mudahnya pemerintahan 4.0, ekonomi digital, atau taksis terbang, realitasnya kita belum jadi produsen teknologi atau pemain digital. Kita sebatas pengguna teknologi dan, karena ketidakcakapan penguasa data, masih jadi mainan digital.

LYNDA IBRAHIM
Konsultan Bisnis dan Penulis